



**PERATURAN DESA DUKUHTENGAH  
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO**

**NOMOR : 05 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KABUPATEN SIDOARJO**



KEPALA DESA DUKUHTENGGAH  
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA DUKUHTENGGAH  
NOMOR 05 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHTENGGAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DUKUHTENGGAH

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,



- 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
- 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
- 14 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
- 15 Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
- 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);



- 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
- 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
- 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
- 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
- 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
- 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa (berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 10);
- 27 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
- 28 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
- 29 Peraturan Desa Dukuhtengah Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2021 - 2027
- 30 Peraturan Desa Dukuhtengah Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHTENGAH  
Dan  
KEPALA DESA DUKUHTENGAH  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA DUKUHTENGAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DUKUHTENGAH Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.316.446.395,00
2. Belanja Desa	Rp	2.220.278.741,79
Surplus/Defisit	Rp	96.167.653,21
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	124.257.546,79
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	220.425.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(96.167.653,21)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa DUKUHTENGAH.

Ditetapkan di : DUKUHTENGAH  
Pada tanggal : 27 Desember 2025  
KEPALA DESA DUKUHTENGAH,

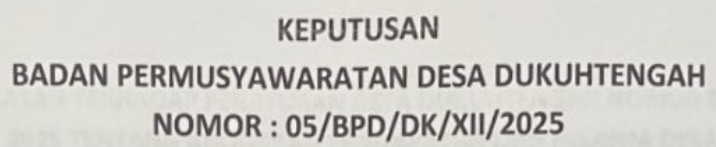


Diundangkan di : DUKUHTENGAH  
Pada tanggal : 27 Desember 2025



RISATUDIN ASGAR  
LEMBARAN DESA DUKUHTENGAH NOMOR 05 TAHUN 2025





KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA DUKUHTENGAH NOMOR 05  
TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN SIDOARJO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**

**DESA DUKUHTENGAH**

**KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO**

Sekretariat : Jl.Pahlawan No. 17 RT. 03 RW. 02 Dukuhtengah Kode Pos 61252

---

**KEPUTUSAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHTENGAH**

**NOMOR : 05/BPD/DK/XII/2025**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA DUKUHTENGAH NOMOR 05 TAHUN  
2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



- 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
- 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
- 14 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
- 15 Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
- 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman



- Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
- 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
  - 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
  - 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
  - 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
  - 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
  - 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
  - 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
  - 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
  - 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 10);
  - 27 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
  - 28 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
  - 29 Peraturan Desa Dukuhtengah Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2021 - 2027
  - 30 Peraturan Desa Dukuhtengah Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHTENGAH

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Peraturan Desa Dukuhtengah Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dukuhtengah Tahun Anggaran 2026

KEDUA : :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.316.446.395,00
2. Belanja Desa	Rp	2.220.278.741,75
Surplus/(Defisit)	Rp	96.167.653,21
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	124.257.546,75
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	220.425.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(96.167.653,21)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DUKUHTENGAH

Pada tanggal : 27 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



MOCH. ROJIN, M.Pd.I



## NOTULEN RAPAT

### PEMBAHASAN PERATURAN DESA DUKUHTENGGAH NOMOR 05 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2026

Sehubungan dengan nota penyampaian Peraturan Desa Dukuhtengah Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 Desa Dukuhtengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, setelah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan Buduran pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025, maka pada hari ini :

Hari / Tanggal : Sabtu , 27 Desember 2025

Jam : 08.30 WIB

Tempat : Balai Desa Dukuhtengah

Telah diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh :

- Ketua dan Anggota BPD Desa Dukuhtengah
- Kepala Desa Dukuhtengah
- Perangkat Desa Dukuhtengah

Daftar Hadir Terlampir.

Unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah sebagai berikut :

- Pimpinan Rapat : MOCH. ROJIN, M.Pd.I (Ketua BPD)
- Sekretaris/Notulen : RISAUDIN ASGAF, S.HI
- Nara Sumber : CHUSNUL AROFIQ (Kepala Desa )

Materi yang dibicarakan adalah sebagai berikut :

- Pendapatan Desa Sebesar : Rp. 2.316.446.395,00
- Belanja Desa Sebesar : Rp. 2.220.278.741,79
- Pembiayaan Desa Sebesar : Rp. 96.167.653,21

Setelah dilakukan pembahasan materi tersebut diatas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang menjadi keputusan akhir rapat tersebut yaitu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DUKUHTENGGAH Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

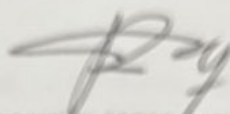
1. Pendapatan Desa	Rp	2.316.446.395,00
2. Belanja Desa	Rp	2.220.278.741,79
Surplus/(Defisit)	Rp	96.167.653,21
3. Pembiayaan		
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp	124.257.546,79
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	220.425.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(96.167.653,21)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Keputusan diatas diambil secara musyawarah dan semua peserta rapat sepakat Rancangan Peraturan Desa Dukuhtengah Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 ditetapkan menjadi Peraturan Desa Dukuhtengah Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026.

Demikian Notulen rapat ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dukuhtengah, 27 Desember 2025.

Notulen / Sekretaris

  
RISAUDIN ASGAF S.H.

  
Pimpinan Rapat  
  
MOCH. ROHIL M.Pd.I

  
Mengetahui,  
Kepala Desa Dukuhtengah  
  
EHUSNUL AROFQI



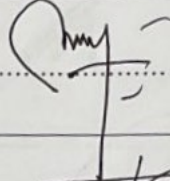
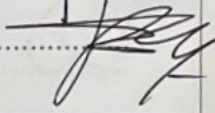
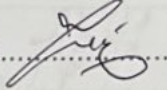
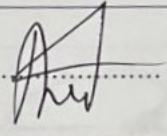
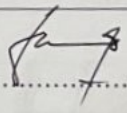
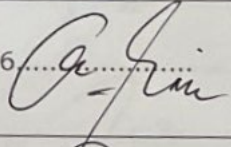
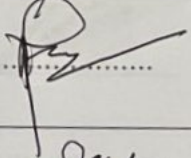
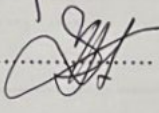
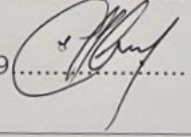
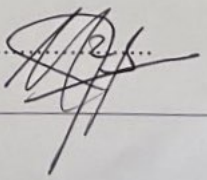
## DAFTAR HADIR

**Hari / tanggal** : Sabtu/27 Desember 2025.

**Waktu** : 08.30 wib - selesai

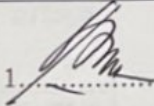
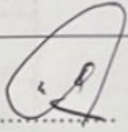
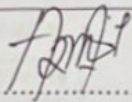
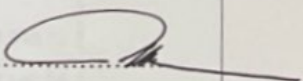
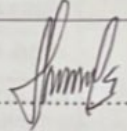
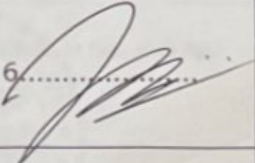
**Tempat** : Balai Desa Dukuhtengah

**Acara** : Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa Dukuhtengah Nomor 05 Tahun 2025 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	CHUSNUL AROFIQ	KEPALA DESA	1..... 
2.	RISAUDIN ASGAF, S.HI	PERANGKAT DESA	2..... 
3.	NUR MUJIYATI MUFIDAH	PERANGKAT DESA	3..... 
4.	MUH. ALFIN KHUSAINI	PERANGKAT DESA	4..... 
5.	M. NA'AM	PERANGKAT DESA	5..... 
6.	H. GUFRON	PERANGKAT DESA	6..... 
7.	NURUL MUCHSON	PERANGKAT DESA	7..... 
8.	TOMI SABILILLAH	PERANGKAT DESA	8..... 
9.	SUPAITO	PERANGKAT DESA	9..... 
10.	MOH. ROFIQ	PERANGKAT DESA	10..... 

## DAFTAR HADIR

**Hari / tanggal** : Sabtu/27 Desember 2025.  
**Waktu** : 08.30 wib - selesai  
**Tempat** : Balai Desa Dukuhtengah  
**Acara** : Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa Dukuhtengah Nomor 05 Tahun 2025 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOCH. ROJIN, M.Pd.I	KETUA BPD	1. 
2.	AL MUZAKAR	WAKIL KETUA BPD	2. 
3.	AZMIL UMUR, SE	SEKRETARIS BPD	3. 
4.	M. YUSUF, SE	ANGGOTA BPD	4. 
5.	FATIMATUS SA'DIYAH, S.Pd. PAUD	ANGGOTA BPD	5. 
6.	M. NUR WAHYUDI, S.Pd	ANGGOTA BPD	6. 
7.	SOPHANHADI	ANGGOTA BPD	7. ....



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA DUKUHTENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	99.075.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.217.371.395,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.316.446.395,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	726.560.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	955.290.640,79	
5.3.	Belanja Modal	361.428.101,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	177.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.220.278.741,79</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>96.167.653,21</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	124.257.546,79	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	124.257.546,79	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	220.425.200,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	220.425.200,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(96.167.653,21)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



31 Desember 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA DUKUHTENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	99.075.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.217.371.395,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.316.446.395,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.129.443.272,79</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	926.762.777,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.040.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	383.040.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	143.732.997,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.732.997,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.000.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18.910.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.910.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.496.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.496.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.063.780,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.063.780,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	30.580.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	30.580.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	171.940.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	171.940.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>23.233.769,79</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.377.255,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.377.255,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	19.856.514,79	DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.856.514,79	
1.3.		<b>Penelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>10.136.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.136.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.136.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>32.971.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.900.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.675.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.675.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.496.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.496.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	9.900.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>136.339.726,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	25.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	17.000.000,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	94.339.726,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.339.726,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>631.985.469,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>34.583.020,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.350.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.350.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.233.020,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	10.233.020,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>253.084.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.460.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.460.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	137.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	16.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	36.674.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.674.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.750.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	19.200.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	19.200.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	20.400.000,00	PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
2.2.91		Dukungan Pencegahan/Perlindungan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Men	8.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>344.318.449,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	30.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	16.790.200,00	DDS, PBH
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.200,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	16.750.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	176.338.089,00	DDS, PBH
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	370.263,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	175.967.826,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	70.168.000,00	DDS, PBH
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	51.022.160,00	DDS, PBH
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.160,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	50.900.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>188.965.000,00</b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>62.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	41.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	21.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>60.155.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	25.235.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.235.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	15.000.000,00	PBH
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	19.920.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.920.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	66.810.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.810.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.810.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	59.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>92.885.000,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	37.750.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.750.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.935.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	19.935.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.935.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.200.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	10.200.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>177.000.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.220.278.741,79</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>96.167.653,21</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	124.257.548,79	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	220.425.200,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(96.167.653,21)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



31 Desember 2025

PERATURAN KEPALA DESA DUKUHTENGHAH  
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 06 TAHUN 2025

TENTANG

PENIABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026





PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAJUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2025

## PERATURAN KEPALA DESA DUKUHTENGAH KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 06 TAHUN 2025  
TENTANG

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang  
Pembentukan Daerah Kabupaten 8 Tahun 2025 Nomor  
11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kota Baru  
Meningkatkan Peringkat Desa Tahun, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan  
Lain-lain lainnya yang sudah disetujui Negara Republik Indonesia  
Tahun 1962 Nomor 15, Tanggal 15 Januari 1962, Lembaran Negara  
Indonesia Nomor 2730

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Rancangan  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Rancangan  
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183, Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6109

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang  
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5327)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564)

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang  
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5775)

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang  
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5327)

KABUPATEN SIDOARJO



KEPALA DESA DUKUHTENGGAH  
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN KEPALA DESA DUKUHTENGGAH  
NOMOR 06 TAHUN 2025  
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHTENGGAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DUKUHTENGGAH

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  - 8 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
  - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  - 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
  - 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
  - 14 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
  - 15 Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan
  - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
  - 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
  - 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
  - 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
  - 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun

2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);

- 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
- 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
- 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
- 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa (berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 10);
- 27 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
- 28 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
- 29 Peraturan Desa Dukuhtengah Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2021 - 2027
- 30 Peraturan Desa Dukuhtengah Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHTENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

#### Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 99.075.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 2.217.371.395,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 0,00
Jumlah Pendapatan	Rp 2.316.446.395,00



## 2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.129.443.272,79
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	631.985.469,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	188.965.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	92.885.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	177.000.000,00

Jumlah Belanja	Rp	2.220.278.741,79
----------------	----	------------------

Surplus/Defisit	Rp	96.167.653,21
-----------------	----	---------------

## 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	124.257.546,79
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	220.425.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(96.167.653,21)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : DUKUHTENGAH

Pada tanggal : 27 Desember 2025



Diundangkan di : DUKUHTENGAH

Pada tanggal : 27 Desember 2025



BERITA DESA DUKUHTENGAH TAHUN 2026 NOMOR 06

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA DUKUHTENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			99.075.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			99.075.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			89.075.000,00	
	4.1.2.08	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga			10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			2.217.371.395,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.102.126.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.102.126.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			682.489.395,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			682.489.395,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			432.756.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			432.756.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.316.446.395,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>				
01		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			1.129.443.272,79	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			926.762.777,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	ORANG/BULAN	72.000.000,00	ADD, PBH
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			72.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			72.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			60.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			12.000.000,00	
1.01.02.		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	100	PERSEN	<b>383.040.000,00</b>	ADD, PBH
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			383.040.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			383.040.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			319.200.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			63.840.000,00	
1.01.04.		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>	100	PERSEN	<b>143.732.997,00</b>	PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			143.732.997,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			25.892.997,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.556.161,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			2.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			5.436.836,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			4.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			79.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			24.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			55.200.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			18.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			8.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			10.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			20.640.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			1.440.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			7.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			0,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	100	PERSEN	69.000.000,00	ADD, PBH
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			69.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			69.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			69.000.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	100	PERSEN	18.910.000,00	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.910.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.060.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			250.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.560.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.850.000,00	
1.01.06.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			10.850.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	100	PERSEN	4.496.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.496.000,00	
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.496.000,00	
1.01.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			4.496.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	100	PERSEN	33.063.780,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.063.780,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			21.063.780,00	
1.01.08.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Lis Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			4.800.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			16.263.780,00	
1.01.08.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			12.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1 01 06.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan			12 000 000 00	
1.01.90.		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	100	PERSEN	30.580.000,00	PAD, PBH
1 01 90	5.1.	Belanja Pegawai			30.580.000,00	
1 01 90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			30.580.000 00	
1 01 90	5.1.1.90	Tunjangan Keluarga			6 000 000 00	
1 01 90.	5.1.1.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa			16 800 000 00	
1 01 90	5.1.1.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa			2 500 000 00	
1 01 90	5.1.1.94	Uang Makan			5 280 000 00	
1.01.91.		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	100	PERSEN	171.940.000,00	PAD, PBH
1 01 91.	5.1.	Belanja Pegawai			171.940.000,00	
1 01 91	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			171.940.000 00	
1 01 91.	5.1.2.90	Tunjangan Keluarga			31 920 000 00	
1 01 91.	5.1.2.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa			79 200 000 00	
1.01.91.	5.1.2.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa			13 300 000 00	
1 01 91.	5.1.2.94	Uang Makan			47 520 000 00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			23.233.769,79	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	100	PERSEN	3.377.255,00	PAD
1 02 01.	5.3.	Belanja Modal			3.377.255,00	
1 02 01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.377.255 00	
1 02 01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	100	PERSEN	3.377.255,00	DLL, PBH
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			19.856.514,79	
1 02 02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.856.514,79	
1 02 02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2 000 000 00	
1 02 02.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			2 000 000 00	
1 02 02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			17 856 514,79	
1 02 02.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			3 000 000 00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			3.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			11.856.514,79	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			10.136.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendaftaran, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	100	PERSEN	10.136.000,00	DOS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.136.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Peralengkapan			4.500.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
1.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.700.000,00	
1.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas			3.700.000,00	
1.03.02.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			250.000,00	
1.03.02.	5.2.5.	Belanja Jasa Operasional Perkantoran			936.000,00	
1.03.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			936.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			32.971.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	100	PERSEN	7.900.000,00	PBH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.900.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Peralengkapan			3.400.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.150.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
1.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.500.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	7
1.04.01.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	100	PERSEN	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			
1.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spenduk			
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	100	PERSEN	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			
1.04.11.		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	100	PERSEN	PBH
1.04.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			
1.04.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			
1.04.11.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			
1.04.11.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spenduk			
1.04.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			
1.04.11.	5.2.2.93	Belanja Jasa Honorarium Juri Lomba			
1.04.11.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			
1.04.11.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			
1.05.01.		Sertifikasi Tanah Kas Desa	100	PERSEN	PBH
1.05.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			25.000.000,00	
1.05.01.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			25.000.000,00	
1.05.90.		<b>Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD</b>	100	PERSEN	<b>17.000.000,00</b>	PBH
1.05.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>17.000.000,00</b>	
1.05.90.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			17.000.000,00	
1.05.90.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			17.000.000,00	
1.05.91.		<b>Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	100	PERSEN	<b>94.339.726,00</b>	PBH
1.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>94.339.726,00</b>	
1.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.400.000,00	
1.05.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.650.000,00	
1.05.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.750.000,00	
1.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.425.000,00	
1.05.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.375.000,00	
1.05.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			800.000,00	
1.05.91.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			250.000,00	
1.05.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.000.000,00	
1.05.91.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			7.000.000,00	
1.05.91.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			10.000.000,00	
1.05.91.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			10.000.000,00	
1.05.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			55.514.726,00	
1.05.91.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			55.514.726,00	
02		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>631.985.469,00</b>	
02.01.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>34.583.020,00</b>	
2.01.01.		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</b>	100	PERSEN	<b>24.350.000,00</b>	DDS
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>24.350.000,00</b>	
2.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.550.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
2.01.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			250.000,00	
2.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	
2.01.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
2.01.01.	5.2.1.09	Belanja Pakain Dinas/Seragam/Atribut			1.800.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.400.000,00	
2.01.01.	5.2.2.90	Belanja Jasa Pelaksanaan Pendidikan Desa			14.400.000,00	
2.01.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.400.000,00	
2.01.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.400.000,00	
2.01.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	100	PERSEN	10.233.020,00	DDS
2.01.02.	5.3.	Belanja Modal			10.233.020,00	
2.01.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			10.233.020,00	
2.01.02.	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			10.233.020,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			253.084.000,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	100	PERSEN	8.460.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.460.000,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.060.000,00	
2.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
2.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.760.000,00	
2.02.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.400.000,00	
2.02.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.400.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	100	PERSEN	137.600.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			137.600.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			111.600.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			111.600.000,00	
2.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			26.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.3.01			2.000.000,00	
2.02.02.	5.2.3.90			24.000.000,00	
2.02.03.		100	PERSEN	16.000.000,00	DOS
2.02.03.	5.2.			16.000.000,00	
2.02.03.	5.2.1.			6.800.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06			6.300.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08			500.000,00	
2.02.03.	5.2.2.			2.200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04			1.500.000,00	
2.02.03.	5.2.2.05			200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.91			500.000,00	
2.02.03.	5.2.3.			7.000.000,00	
2.02.03.	5.2.3.90			7.000.000,00	
2.02.04.		100	PERSEN	36.674.000,00	DOS
2.02.04.	5.2.			36.674.000,00	
2.02.04.	5.2.1.			3.700.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01			300.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06			3.150.000,00	
2.02.04.	5.2.1.08			250.000,00	
2.02.04.	5.2.2.			3.750.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04			1.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05			2.500.000,00	
2.02.04.	5.2.2.91			250.000,00	
2.02.04.	5.2.3.			4.600.000,00	
2.02.04.	5.2.3.01			1.100.000,00	
2.02.04.	5.2.3.90			3.500.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			624.000,00	
2.02.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			624.000,00	
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			24.000.000,00	
2.02.04.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			24.000.000,00	
2.02.06.		<b>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</b>	100	PERSEN	6.750.000,00	DOS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.750.000,00	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.750.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.750.000,00	
2.02.09.		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **</b>	100	PERSEN	19.200.000,00	DOS
2.02.09.	5.3.	Belanja Modal			19.200.000,00	
2.02.09.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			19.200.000,00	
2.02.09.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			19.200.000,00	
2.02.90.		<b>Penyelenggaraan Senam Desa</b>	100	PERSEN	20.400.000,00	PSH
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.400.000,00	
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.000.000,00	
2.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.000.000,00	
2.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
2.02.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
2.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			900.000,00	
2.02.91.		<b>Dukungan Pencegahan/Penanganan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Men</b>	100	PERSEN	8.000.000,00	DOS
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.000.000,00	
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.400.000,00	
2.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.150.000,00	
2.02.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
2.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.100.000,00	
2.02.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			100.000,00	
2.02.91.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			250.000,00	
2.02.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.500.000,00	
2.02.91.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.500.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			344.318.449,00	
2.03.05.		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	100	PERSEN	30.000.000,00	DDS
2.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
2.03.05.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			30.000.000,00	
2.03.05.	5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			30.000.000,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	100	PERSEN	16.790.200,00	DDS, PBH
2.03.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			40.200,00	
2.03.11.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			40.200,00	
2.03.11.	5.2.7.92	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja			40.200,00	
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			16.750.000,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			16.750.000,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			5.500.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			10.500.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	100	PERSEN	176.338.089,00	DDS, PBH
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			370.263,00	
2.03.14.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			370.263,00	
2.03.14.	5.2.7.92	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja			370.263,00	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			175.967.826,00	
2.03.14.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			175.967.826,00	
2.03.14.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.650.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.14.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			54.500.000,00	
2.03.14.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			119.817.826,00	
2.03.15.		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)</b>	100	PERSEN	<b>70.168.000,00</b>	DDS, PBH
2.03.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			168.000,00	
2.03.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			168.000,00	
2.03.15.	5.2.7.92	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja			168.000,00	
2.03.15.	5.3.	Belanja Modal			70.000.000,00	
2.03.15.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			70.000.000,00	
2.03.15.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.03.15.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			20.100.000,00	
2.03.15.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			49.000.000,00	
2.03.20.		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)</b>	100	PERSEN	<b>51.022.160,00</b>	DDS, PBH
2.03.20.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			122.160,00	
2.03.20.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			122.160,00	
2.03.20.	5.2.7.92	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja			122.160,00	
2.03.20.	5.3.	Belanja Modal			50.900.000,00	
2.03.20.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			50.900.000,00	
2.03.20.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.03.20.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			15.000.000,00	
2.03.20.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			35.000.000,00	
03		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>188.965.000,00</b>	
03.02.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>62.000.000,00</b>	
3.02.03.		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>	100	PERSEN	<b>41.000.000,00</b>	PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			41.000.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.500.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			500.000,00	
3.02.03.	5.2.1.90	Belanja Pendukung Kegiatan Adat/Kebudayaan/Keagamaan (Ruwat Desa / N			8.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			10.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			10.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			14.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masy			4.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			10.000.000,00	
3.02.90.		<b>Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)</b>	100	PERSEN	21.000.000,00	PBH
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.000.000,00	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.000.000,00	
3.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			21.000.000,00	
03.03.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			60.155.000,00	
3.03.02.		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</b>	100	PERSEN	25.235.000,00	DDS
3.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.235.000,00	
3.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.885.000,00	
3.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.835.000,00	
3.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
3.03.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.800.000,00	
3.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.350.000,00	
3.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
3.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			100.000,00	
3.03.02.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			250.000,00	
3.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
3.03.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.000.000,00	
3.03.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk: Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
3.03.04.		<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</b>	100	PERSEN	15.000.000,00	PBH
3.03.04.	5.3.	Belanja Modal			15.000.000,00	
3.03.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			15.000.000,00	
3.03.04.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			15.000.000,00	
3.03.06.		<b>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>	100	PERSEN	19.920.000,00	PBH
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.920.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.420.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.250.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.820.000,00	
3.03.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
3.03.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.100.000,00	
3.03.06.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			6.000.000,00	
3.03.06.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			6.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.500.000,00	
3.03.06.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.500.000,00	
03.04.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			66.810.000,00	
3.04.02.		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	100	PERSEN	7.810.000,00	PBH
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.810.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.810.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.860.000,00	
3.04.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.700.000,00	
3.04.03.		<b>Pembinaan PKK</b>	100	PERSEN	59.000.000,00	PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			59.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			32.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			28.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			750.000,00	
3.04.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.250.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.000.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			8.000.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.000.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			8.000.000,00	
3.04.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			2.000.000,00	
3.04.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.000.000,00	
3.04.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			3.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			6.000.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>92.885.000,00</b>	
<b>04.02.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>37.750.000,00</b>	
<b>4.02.04.</b>		<b>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</b>	<b>100</b>	<b>PERSEN</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>DDS</b>
4.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
4.02.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			30.000.000,00	
4.02.04.	5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			30.000.000,00	
<b>4.02.05.</b>		<b>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan</b>	<b>100</b>	<b>PERSEN</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>DDS</b>
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.750.000,00	
4.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.400.000,00	
4.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.150.000,00	
4.02.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750.000,00	
4.02.05.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			100.000,00	
4.02.05.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.500.000,00	
4.02.05.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.500.000,00	
04.03.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			25.000.000,00	
4.03.01.		<b>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</b>	100	PERSEN	10.000.000,00	PBH
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.000.000,00	
4.03.01.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			10.000.000,00	
4.03.02.		<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	100	PERSEN	15.000.000,00	PBH
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			15.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			15.000.000,00	
04.04.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			19.935.000,00	
4.04.01.		<b>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</b>	100	PERSEN	19.935.000,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.935.000,00	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.085.000,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.835.000,00	
4.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
4.04.01.	5.2.1.09	Belanja Pakain Dinas/Seragam/Atribut			9.000.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.850.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
4.04.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			100.000,00	
4.04.01.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			250.000,00	
4.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
4.04.01.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
4.04.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			10.200.000,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	100	PERSEN	10.200.000,00	DOS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.200.000,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.600.000,00	
4.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.350.000,00	
4.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
4.06.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.000.000,00	
4.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.100.000,00	
4.06.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750.000,00	
4.06.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			100.000,00	
4.06.02.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			250.000,00	
4.06.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00	
4.06.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			1.500.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			177.000.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			15.000.000,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	100	PERSEN	15.000.000,00	DOS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			15.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			15.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			15.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			162.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	100	PERSEN	162.000.000,00	DOS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			162.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			162.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			162.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA			2.220.278.741,79	
	SURPLUS DEFISIT			96.167.653,21	
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan			124.257.546,79	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya			124.257.546,79	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			124.257.546,79	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			220.425.200,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			220.425.200,00	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			220.425.200,00	
	PEMBIAYAAN NETTO			96.167.653,21	
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



31 Desember 2025